

ANALISIS STAKEHOLDERS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) MENGENDEK, KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN

(Stakeholders Analysis of the Management Mengkendek Forest for Special Purpose (KHDTK Mengkendek), Tana Toraja District, South Sulawesi Province)

Abd. Kadir Wakka

Balai Penelitian Kehutanan Makassar,
Jl. Perintis Kemerdekaan Km 16. Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, Kode Pos 90243
Telp. (0411) 554049, Fax. (0411) 554058
Email : abdkadirw@yahoo.com

Diterima 12 Juli 2013; revisi terakhir 8 April 2013; disetujui 10 April 2014

ABSTRAK

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek yang berbatasan langsung dengan kawasan pemukiman penduduk sangat rentan terhadap terjadinya perambahan hutan, pencurian kayu, penggembalaan liar dan kebakaran hutan. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan yang ada sehingga tujuan pengelolaan KHDTK dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, memetakan dan merumuskan peran *stakeholders* dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) untuk kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam *stakeholders* dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek. Balai Penelitian Kehutanan Makassar (BPK Makassar), Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tana Toraja, pemerintah kelurahan/lembang dan lembaga adat (tongkonan) merupakan *key players* dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek. Komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholders* tersebut harus dapat dilakukan dengan baik sehingga tujuan pengelolaan KHDTK Mengkendek dapat terwujud.

Kata Kunci : KHDTK Mengkendek, analisis *stakeholders*, pemetaan *stakeholders*

ABSTRACT

Forest for special purpose of Mengkendek (KHDTK Mengkendek) which directly adjacent to settlement is vulnerable to encroachment, illegal logging, illegal grazing, and forest fires. Requiring the involvement of stakeholders in helping to overcome the existing problems so that the objectives of KHDTK Mengkendek can be realized. This study aims to identify, mapping and formulate the role of stakeholders in the management KHDTK Mengkendek. The data was collected through interviews and focus group discussions then analyzed in descriptive qualitative. The results showed that there are six stakeholders in the management KHDTK Mengkendek. Forestry Research Institute of Makassar, Forestry Office of Tana Toraja, government village/lembang, and traditional institutions (tongkonan) are key players in the management KHDTK Mengkendek. Communication and coordination with the stakeholders must be done well so that the objectives of KHDTK Mengkendek management can be realized.

Keywords : KHDTK Mengkendek, stakeholders analysis, mapping stakeholders

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Penelitian Kehutanan Makassar (BPK Makassar) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 367/Menhut-II/2004 mengelola tiga Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) di antaranya KHDTK Mengkendek yang terletak di Kabupaten Tana Toraja. Areal KHDTK Mengkendek berbatasan

langsung dengan kawasan pemukiman penduduk yang merupakan pusat pengembangan kota Ge'tengan Kecamatan Mengkendek sehingga mengundang berbagai pihak (*stakeholders*) untuk memanfaatkannya. Pemanfaatan KHDTK Mengkendek oleh *stakeholders* terkadang bertentangan dengan tujuan pengelolaan KHDTK Mengkendek sebagai areal hutan penelitian BPK Makassar.

Beberapa bentuk kegiatan pemanfaatan areal KHDTK Mengkendek yang bertentangan dengan tujuan pengelolaan KHDTK tersebut adalah okupasi lahan/perambahan lahan (untuk berkebun, kavling perumahan dan sertifikasi lahan), penebangan kayu secara ilegal (*illegal logging*), dan penggembalaan ternak. (Kadir, *et al.*, 2008). Kegiatan-kegiatan tersebut di atas dapat menghambat pelaksanaan kegiatan penelitian BPK Makassar serta menyebabkan rusaknya ekosistem hutan yang ada. Dampak dari kerusakan ekosistem hutan di KHDTK Mengkendek (terjadinya banjir dan longsor) tidak hanya dirasakan oleh BPK Makassar selaku pengelola KHDTK tetapi juga akan dirasakan oleh masyarakat sekitar KHDTK serta pihak lain yang terkait dengan pengelolaan hutan di Kabupaten Tana Toraja.

Sangat penting untuk menganalisis *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek. Melalui analisis *stakeholders* akan tergambar kepentingan setiap *stakeholders* apakah berdampak positif atau negatif terhadap pengelolaan KHDTK, *stakeholders* yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan serta peran *stakeholders* dalam mengatasi dan mencegah terjadinya kerusakan areal KHDTK Mengkendek yang lebih parah di masa mendatang. Analisis *stakeholders* juga dapat membantu dalam memobilisasi sumberdaya lokal (Rastogi, *et al.*, 2010) serta dapat membantu dalam memahami konflik penggunaan sumberdaya lahan yang terjadi (Mushove and Vogel, 2005).

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan memetakan *stakeholders* berdasarkan pengaruh (*power*) dan kepentingannya (*interest*), serta menguraikan peran yang dapat dilakukan dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi BPK Makassar dalam mengelola KHDTK Mengkendek sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada KHDTK Mengkendek yang terletak di Kelurahan Rante Kalua, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan

yang dimulai pada Bulan Agustus s/d November 2009.

B. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan sejumlah informan kunci seperti aparat Kelurahan Rante Kalua (1 orang), staf penyuluh kehutanan Tana Toraja (1 orang), staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tana Toraja (2 orang), petani penggarap lahan di KHDTK Mengkendek (5 orang) dan tokoh masyarakat (2 orang). Kegiatan wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai pihak-pihak (*stakeholder*) yang dapat terlibat dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek berbasis masyarakat.

Selain melakukan wawancara dengan sejumlah informan kunci, pengumpulan data juga dilakukan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diikuti oleh petani penggarap lahan di KHDTK Mengkendek (25 orang), koordinator penyuluh kehutanan Tana Toraja (1 orang), staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tana Toraja (1 orang), aparat Kelurahan Rante Kalua (1 orang), dan tokoh masyarakat (2 orang). Kegiatan FGD ini dimaksudkan memetakan *stakeholders* berdasarkan pengaruh (*power*) dan kepentingannya (*interest*), serta merumuskan peran-peran yang dapat dilakukan dalam mendukung tujuan pengelolaan KHDTK Mengkendek.

C. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis *stakeholders* secara kualitatif (Bracke, *et al.*, 2005; Reed *et al.*, 2009; dan Meyers, 2005). Analisis *stakeholders* secara kualitatif digunakan untuk menjelaskan *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek, kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) setiap *stakeholders* serta untuk menjelaskan peran *stakeholders* dalam mendukung tujuan pengelolaan KHDTK Mengkendek.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KHDTK Mengkendek

Luas KHDTK Mengkendek berdasarkan SK Menhut No. 275/Kpts-1/1994 adalah 100 ha. Lokasi KHDTK Mengkendek terletak di Kelurahan Rante Kalua, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Lokasi KHDTK Mengkendek secara administrasi termasuk ke dalam wilayah Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Tana Toraja (BPPKS, 2006).

Lokasi KHDTK Mengkendek yang berbatasan langsung dengan areal pemukiman penduduk dan sangat dekat dengan Ge'tengan yang merupakan ibukota Kelurahan Rante Kalua menyebabkan areal KHDTK sangat rentan untuk dirambah. Beberapa alasan mengapa masyarakat mulai aktif berkebun dan mengkaveling lahan di KHDTK Mengkendek pada tahun 2000-an, di antaranya (Kadir dan Hapsari, 2011) :

- a. Masyarakat mengklaim bahwa areal KHDTK Mengkendek merupakan tanah adat yang ditandai oleh adanya kuburan batu dan bekas lokasi penyelenggaraan pesta adat masyarakat Tampo.
- b. Untuk membendung masuknya "orang luar" yang akan menguasai tanah-tanah yang ada di sekitar hutan seiring meningkatnya harga tanah karena perkembangan kota Ge'tengan yang pesat serta adanya isu rencana

pembangunan bandara udara di sekitar lokasi KHDTK Mengkendek.

- c. Keterbatasan lahan garapan untuk berkebun. Sebagian masyarakat di sekitar KHDTK Mengkendek tidak memiliki lahan untuk berkebun sehingga melakukan kegiatan perambahan lahan di areal KHDTK.

Berdasarkan peta penggunaan lahan yang dibuat pada tahun 1999, luas areal hutan yang didominasi oleh tanaman pinus mencapai 38 ha. Sedangkan luar areal kebun campuran mencapai 12 ha dan semak belukar sebesar 50 ha. Sementara pengukuran yang dilakukan pada tahun 2008 menunjukkan bahwa luas areal hutan di KHDTK Mengkendek mengalami penyusutan sebanyak 11 ha dalam kurung waktu 9 tahun atau rata-rata 1,22 ha/tahun. Areal hutan yang mengalami penyusutan berubah menjadi kebun campuran seluas 9,5 ha dan semak belukar seluas 1,5 ha. Kondisi luas penutupan lahan di KHDTK Mengkendek diuraikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kondisi Luas Penutupan Lahan di KHDTK Mengkendek

Table 1. Land cover conditions in KHDTK Mengkendek

Jenis Penutupan Lahan (types of land cover)	Luas pada Tahun 1999 (Site in 1999) (Ha)	Luas pada Tahun 2008 (Site in 2008) (Ha)	Perubahan (change) (Ha)
Hutan (Forest)	38,00	27,00	- 11,00
Kebun Campuran (mixed farms)	12,00	21,50	+ 9,50
Semak Belukar (bush)	50,00	51,50	+ 1,50

Sumber : Kadir et al., 2008

Source : Kadir et al., 2008

Jenis utama penyusun tegakan hutan di KHDTK Mengkendek adalah pinus (*Pinus merkusii*). Namun demikian juga terdapat jenis tanaman lain seperti cemara gunung (*Casuarina junghuniana*), suren (*Toona sureni*), uru/cempaka (*Michelia sp*), agathis (*Agathis sp*), sengan (*Paraserianthes falcataria*), dan akasia (*Acacia mangium*). Tegakan pinus yang ada merupakan hasil kegiatan penghijauan yang dilaksanakan sekitar tahun 1970-an dan hasil permudaan alami. Kondisi tegakan pinus yang ada sebagian masih cukup bagus dan sebagian lagi mengalami kerusakan. Kerusakan tegakan pinus disebabkan oleh kegiatan perambahan yang dilakukan masyarakat sekitar dan kebakaran hutan yang sering terjadi di lokasi KHDTK tersebut.

Kondisi kebun campuran yang digarap oleh masyarakat sebagian terawat dengan baik dan sebagian lagi kondisinya tidak terawat. Kebun campuran yang terawat dengan baik

pada umumnya digarap oleh masyarakat yang tidak memiliki lahan garapan di luar KHDTK Mengkendek. Komoditi perkebunan yang banyak dikembangkan oleh masyarakat dalam KHDTK di antaranya cengkeh (*Syzygium aromaticum*), kopi (*Coffea sp*), kakao (*Theobroma cacao*), pisang (*Musa paradisiaca*), nangka (*Artocarpus heterophyllus*), dan durian (*Durio zibethinus*). Sementara kebun yang tidak terawat umumnya hanya dipagari dengan kawat atau dengan bambu untuk menandai lokasi garapannya. Areal semak belukar yang ada umumnya digunakan oleh masyarakat untuk menggembalakan ternak kerbau.

B. Identifikasi Stakeholders

Stakeholders didefinisikan sebagai pihak-pihak yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi (menerima dampak) oleh keputusan yang diambil (Freeman, 1984) atau dapat pula didefinisikan sebagai orang, kelompok atau lembaga yang

memiliki perhatian dan/atau dapat mempengaruhi hasil suatu kegiatan (Salam dan Noguchi, 2006; Kusumedi dan Bisjoe, 2010). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *stakeholders* adalah semua pihak baik secara individu maupun kelompok yang dapat dipengaruhi dan/atau memengaruhi pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan suatu kegiatan.

Berdasarkan keterkaitannya terhadap suatu keputusan atau suatu kegiatan, Townsley (1998) kemudian membedakan *stakeholders* menjadi dua yaitu *stakeholders* primer dan *stakeholders* sekunder. *Stakeholders* primer adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap suatu sumberdaya, baik sebagai mata pencaharian ataupun terlibat langsung dalam eksploitasi. *Stakeholders* ini oleh Yang, *et al.*, (2010) disebut juga sebagai *stakeholders* kunci (*key stakeholders*). *Stakeholders* sekunder adalah pihak yang memiliki minat/kepentingan secara tidak langsung, atau pihak yang tergantung pada sebagian kekayaan atau bisnis yang dihasilkan oleh sumber daya.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan kunci diketahui bahwa terdapat enam *stakeholders* yang dapat terlibat dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek. Keenam *stakeholders* tersebut terdiri dari pemerintah pusat (BPK Makassar), pemerintah daerah (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja), pemerintah kelurahan/lembang, lembaga adat (Tongkonan), masyarakat penggarap lahan/kelompok tani, dan LSM setempat.

Berdasarkan klasifikasi *stakeholders* sebagaimana dikemukakan oleh Townsley (1998) maka *stakeholders* primer dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek terdiri dari :

1. BPK Makassar. BPK Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang diserahkan tugas untuk mengelola KHDTK Mengkendek berdasarkan SK Menhut No. 367/Menhut-II/2004 sehingga sangat berkepentingan terhadap kelestarian kawasan hutan yang ada di KHDTK tersebut.
2. Masyarakat penggarap lahan/kelompok tani. Masyarakat sekitar KHDTK Mengkendek berkepentingan dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang terdapat di KHDTK Mengkendek khususnya

sumberdaya lahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun *stakeholders* sekunder dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek terdiri dari :

1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Tana Toraja. Dishutbun Tana Toraja sangat berkepentingan terhadap kelestarian hutan yang ada di wilayah kerjanya termasuk KHDTK Mengkendek karena merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kehutanan di Kabupaten Tana Toraja. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan kehutanan di Kabupaten Tana Toraja, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tana Toraja dibekali dengan mandat dari pemerintah pusat (Menteri Kehutanan) dan bupati serta ditunjang oleh potensi sumberdaya manusia dan sumberdana yang memadai dalam melaksanakan tupoksinya.
2. Pemerintah Kelurahan Rante Kalua/Lembang. Pemerintah Kelurahan Rante Kalua berkepentingan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari menggarap lahan dalam KHDTK Mengkendek. Institusi kelurahan/lembang sangat besar peranannya dalam memengaruhi masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan yang ada di wilayahnya.
3. Lembaga adat (Tongkonan). Tongkonan berkepentingan dalam hal peningkatan kesejahteraan rumpun anggota keluarganya khususnya yang menggantungkan hidupnya dari areal KHDTK serta berkepentingan dalam mempertahankan klaim bahwa areal KHDTK Mengkendek merupakan tanah adat (tanah milik tongkonan) mereka.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). *Stakeholder* ini berkepentingan dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat (peningkatan pengetahuan dan keterampilan) khususnya dalam hal pengelolaan sumberdaya lahan secara lestari yang diharapkan akan berdampak kepada kelestarian areal KHDTK Mengkendek.

BPK Makassar yang diberikan mandat selaku pengelola KHDTK Mengkendek harus dapat bekerja sama dengan *stakeholders* tersebut di atas dalam mencapai tujuan pengelolaannya. Setiap *stakeholders* memiliki kepentingan, kebutuhan, dan sudut pandang yang berbeda dan harus dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud (Friedman and Miles,

2006; Nielsen dan Mathiesen, 2006). The Clarkson Center for Business Ethics (1999) dalam Friedman and Miles (2006) mengemukakan tujuh prinsip dalam mengelola *stakeholders* yaitu: (1) mengakui dan memperhatikan kepentingan *stakeholders* dalam pengambilan keputusan, (2) menjalin komunikasi secara terbuka terkait kepentingan *stakeholders*, serta menganalisis resiko yang mungkin terjadi akibat keterlibatannya, (3) mengadopsi cara berperilaku dan kemampuan masing-masing *stakeholders*, (4) mengakui saling ketergantungan dan berusaha untuk mencapai distribusi yang adil atas manfaat dan beban di antara *stakeholders*, dengan mempertimbangkan risiko dan kerentanan masing-masing, (5) bekerja sama dengan entitas lain untuk memastikan bahwa risiko dan bahaya yang timbul dapat diminimalkan, (6) menghindari kegiatan yang membahayakan hak asasi manusia (misalnya hak untuk hidup) atau menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima *stakeholders*, dan (7) mengakui potensi konflik akibat adanya peran dan tanggungjawab *stakeholders*, dan mengatasinya melalui komunikasi yang terbuka, dan bila perlu melibatkan pihak ketiga. Dialog antar *stakeholders* menjadi kunci dalam mengatasi perbedaan yang ada (Flak *et al.*, 2008) khususnya dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang terdapat di KHDTK Mengkendek.

C. Pemetaan *Stakeholders* KHDTK Mengkendek

Stakeholders dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek memiliki kepentingan (*interest*) serta pengaruh (*power*) yang beragam, ada yang bersifat positif dan sejalan dengan tujuan pengelolaan KHDTK Mengkendek, adapula yang bersifat negatif dan bertentangan dengan tujuan yang akan dicapai. Kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) dari *stakeholders* dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek yang beragam perlu dipetakan dengan jelas. Pemetaan *stakeholders* akan membantu pengelola bagaimana melibatkan *stakeholders* tersebut dalam pencapaian tujuan (Reed *et al.*, 2009).

Berdasarkan pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang dimiliki oleh setiap *stakeholders* maka *stakeholders* dapat dikategorikan menjadi empat jenis yaitu (Reed *et al.*, 2009; Thompson, 2011; Gardner *et al.*, 1986) :

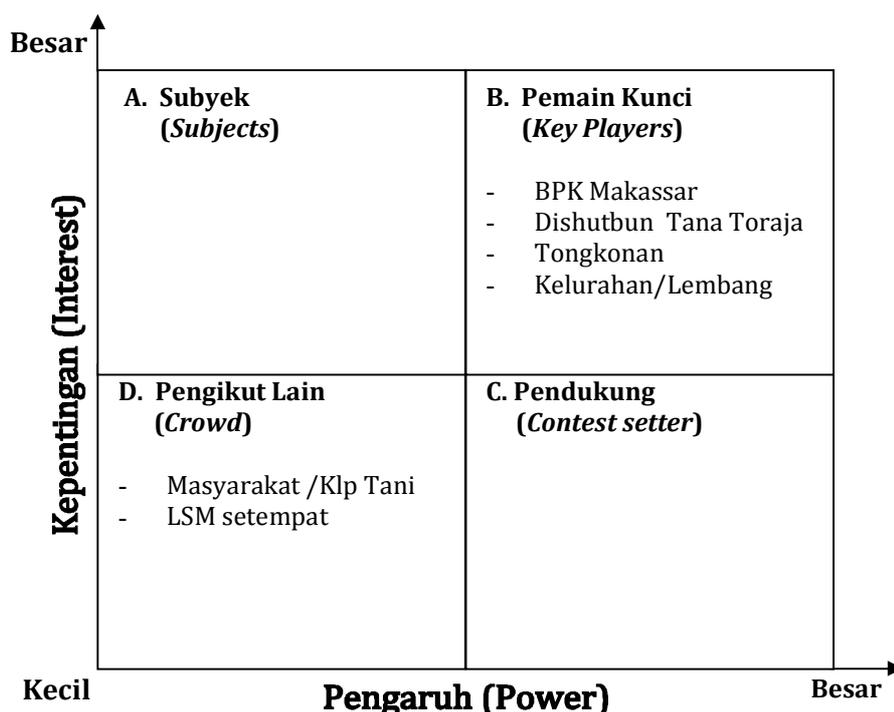
1. *Stakeholder* dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang tinggi tetapi memiliki pengaruh (*power*) yang rendah diklasifikasikan sebagai **Subyek (Subjects)**. *Stakeholders* ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan *stakeholders* lainnya. *Stakeholder* ini sering bisa sangat membantu sehingga hubungan dengan *stakeholders* ini harus tetap dijaga dengan baik.
2. *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) yang tinggi diklasifikasikan sebagai **Pemain Kunci (Key Players)**. *Stakeholders* ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh termasuk dalam mengevaluasi strategi baru.
3. *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) yang rendah diklasifikasikan sebagai **Pengikut Lain (Crowd)**. Diperlukan sedikit pertimbangan untuk melibatkan *stakeholders* ini lebih jauh karena kepentingan dan pengaruh yang dimiliki biasanya berubah seiring berjalannya waktu. *Stakeholders* ini harus tetap dimonitor dan dijalin komunikasi dengan baik.
4. *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang rendah tetapi memiliki pengaruh (*power*) yang tinggi diklasifikasikan sebagai **Pendukung (Contest setters)**. *Stakeholders* ini dapat mendatangkan resiko sehingga keberadaannya perlu dipantau dan dikelola dengan baik. *Stakeholders* ini dapat berubah menjadi *key palyers* karena suatu peristiwa. Hubungan baik dengan *stakeholder* ini terus dibina. Untuk itu segala informasi yang dibutuhkan harus tetap diberikan sehingga mereka dapat terus berperan aktif dalam pencapaian tujuan.

Hasil FGD yang melibatkan sejumlah *stakeholders* diketahui bahwa berdasarkan pengaruh (*power*) dan kepentingannya (*interest*), maka *stakeholders* dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek dapat dikategorikan menjadi dua yaitu *key players* dan *Crowd*. *Stakeholders* yang termasuk dalam kategori *key players* adalah BPK Makassar, Dishutbun Tana Toraja, lembaga adat/tongkonan, dan Pemerintah Kelurahan Rante Kalua. *Stakeholders* yang termasuk dalam kategori *crowd* adalah masyarakat penggarap/kelompok tani dan LSM setempat. Peta *stakeholders* dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek disajikan pada Gambar 1.

Masyarakat penggarap lahan di KHDTK Mengkendek meskipun tergolong sebagai

stakeholder primer karena berkepentingan secara langsung terhadap sumberdaya yang terdapat di KHDTK Mengkendek akan tetapi termasuk dalam kategori *crowd* berdasarkan kepentingan (*interest*) dan pengaruhnya (*power*) terhadap pengelolaan KHDTK Mengkendek. Kepentingan (*interest*) masyarakat sekitar KHDTK pada umumnya khususnya masyarakat yang aktif menggarap lahan di KHDTK Mengkendek hanya ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan berkebun. Aktivitas masyarakat tersebut masih dapat mendukung pengelolaan KHDTK Mengkendek melalui pemberian bimbingan pola pemanfaatan lahan secara lestari (teknik agroforestry). Hal yang perlu diperhatikan dan dijaga adalah mencegah terjadinya perubahan kepentingan dari berkebun menjadi kepentingan untuk menguasai dan memiliki lahan (sertifikasi) karena hal ini akan berdampak buruk pada pencapaian tujuan pengelolaan KHDTK tersebut.



Gambar 1. Pemetaan *Stakeholders* Berdasarkan Pengaruh (*Power*) dan Kepentingannya (*Interest*) dalam Pengelolaan Hutan di KHDTK Mengkendek.

Figure 1. Mapping *Stakeholders* Based on Power and Interests in KHDTK Mengkendek Management.

Pengaruh (*power*) masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek tergolong rendah. Hal ini dapat di lihat dari rendahnya kapasitas masyarakat (pengetahuann dan keterampilan serta finansial terbatas). Disamping itu, kekompakan masyarakat sekitar dalam menyuarakan kepentingannya masih sangat rendah. Masyarakat cenderung mengamankan kepentingannya masing-masing. Hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai masyarakat sekitar KHDTK menyuarakan

kepentingannya dalam bentuk pengerahan massa karena dampak yang ditimbulkannya lebih cenderung merusak.

BPK Makassar selaku pengelola KHDTK Mengkendek sekaligus sebagai salah satu "pemain kunci" (*key player*) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, harus dapat melibatkan secara penuh *key players* lainnya dalam merumuskan dan mengevaluasi strategi pengelolaan KHDTK Mengkendek. Selain harus melibatkan *key players* secara penuh, BPK Makassar juga harus menjalin komunikasi dengan baik dan selalu memonitor

keberadaan *stakeholders* yang dikategorikan sebagai *crowd* (masyarakat penggarap dan LSM setempat) karena kepentingan dan pengaruhnya bisa berubah seiring berjalannya waktu.

D. Peran *Stakeholders* dalam Pengelolaan KHDTK Mengkendek

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa lokasi KHDTK Mengkendek yang strategis dan berbatasan langsung dengan kawasan pemukiman penduduk menyebabkan ekosistem hutan dalam kawasan ini sangat rentan mengalami kerusakan. Perambahan lahan, pencurian kayu (*illegal logging*), penggembalaan liar dan kebakaran hutan merupakan permasalahan yang muncul akibat lokasi KHDTK yang strategis tersebut.

Menghadapi permasalahan tersebut di atas, diperlukan keterlibatan sejumlah *stakeholders* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dengan segala potensi yang dimiliki dan peran yang dapat dilakukannya. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh setiap *stakeholders* dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek di antaranya :

1. BPK Makassar berdasarkan SK Menhut No. 367/Menhut-II/2004 diberikan mandat untuk mengelola KHDTK Mengkendek sebagai hutan penelitian. Selaku pengelola KHDTK, BPK Makassar berperan dalam menyusun rencana dan strategi pengelolaan KHDTK Mengkendek dengan melibatkan seluruh *stakeholders* terkait. BPK Makassar harus dapat melakukan komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholders* lainnya sehingga tercipta kesamaan persepsi dan pembagian peran dalam mewujudkan tujuan pengelolaan KHDTK Mengkendek.
2. Dishutbun Tana Toraja dapat berperan dalam pengamanan areal KHDTK dan membantu dalam merehabilitasi KHDTK Mengkendek melalui program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRH). Selain itu Dishutbun Tana Toraja juga dapat berperan dalam mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap KHDTK Mengkendek melalui program pengembangan hutan rakyat (HR).
3. Pemerintah kelurahan/lembang dapat berperan dalam pengawasan/kontrol dan pengamanan dari kegiatan pengrusakan areal KHDTK Mengkendek. Di samping itu, pemerintah kelurahan/lembang dapat

berperanan dalam memengaruhi masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan KHDTK.

4. Tongkonan dapat berperan menumbuhkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang diperlukan dalam mendukung keberhasilan pengelolaan hutan di KHDTK Mengkendek.
5. Masyarakat penggarap/kelompok Tani dapat berperan dalam pemanfaatan kawasan secara lestari, mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh BPK Makassar serta menjaga keamanan KHDTK Mengkendek dari pihak-pihak yang akan melakukan pengrusakan kawasan tersebut.
6. LSM setempat berperan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui kegiatan pendampingan sehingga lebih mandiri, pemberian bimbingan teknis seperti pembuatan kompos atau bokasi, dan pembuatan biogas sebagai sumber energi/bahan bakar bagi masyarakat sekitar KHDTK Mengkendek.

Keberadaan *stakeholders* dengan segala potensi dan peran yang dapat dilakukan menjadi modal tersendiri bagi BPK Makassar selaku pengelola KHDTK Mengkendek. Kolaborasi dengan *stakeholders* tersebut di atas dapat menjadi kunci sukses dalam mengatasi permasalahan yang ada. Dengan berkolaborasi maka keterbatasan yang dimiliki oleh BPK Makassar seperti keterbatasan dana, sarana dan prasarana, serta keterbatasan sumberdaya manusia dapat teratasi. Keterlibatan *stakeholders* dalam proses kolaborasi diharapkan dapat membuat kebijakan yang diambil lebih efektif dan bertahan lama (Reed, 2008).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Stakeholders yang dapat terlibat dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek terdiri dari BPK Makassar, Dishutbun Tana Toraja, pemerintah kelurahan/lembang, lembaga adat (tongkonan), masyarakat penggarap lahan KHDTK dan LSM setempat. BPK Makassar dan masyarakat penggarap lahan KHDTK dikategorikan sebagai *stakeholders* primer, sementara Dishutbun Tana Toraja, pemerintah kelurahan/lembang, lembaga adat (tongkonan) dan LSM setempat tergolong sebagai *stakeholders* sekunder.

BPK Makassar bersama-sama dengan Dishutbun Tana Toraja, pemerintah kelurahan/lembang, lembaga adat (tongkonan)

merupakan *stakeholders* kunci (*key players*) dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek. *Stakeholders* tersebut memiliki peran yang berbeda dalam pengelolaan KHDTK Mengkendek seperti BPK Makassar berperan dalam merumuskan arah dan strategi pengelolaan KHDTK Mengkendek, Dishutbun Tana Toraja berperan dalam pengamanan dan rehabilitasi kawasan, pemerintah kelurahan berperan dalam pengawasan dan pengamanan kawasan, Tongkonan berperan dalam menumbuhkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan, masyarakat berperan dalam pengamanan dan pemanfaatan kawasan secara lestari, sementara LSM setempat berperan dalam peningkatan kapasitas (pengetahuan dan keterampilan) masyarakat sekitar KHDTK Mengkendek.

B. Saran

BPK Makassar selaku pengelola KHDTK Mengkendek harus dapat mengelola segala potensi dan peran yang dapat dilakukan oleh setiap *stakeholders*. Komunikasi dan koordinasi harus dapat dilakukan dengan baik sehingga tercipta kesamaan persepsi dan pembagian peran di antara *stakeholders* yang ada dalam mewujudkan tujuan pengelolaan KHDTK Mengkendek.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada tim peneliti dan teknisi BPK Makassar: Bapak Priyo Kusumedi, Ibu Evita Hapsari, Andarias Ruru, dan Hamdan, serta masyarakat sekitar KHDTK Mengkendek yang telah membantu dalam proses pengumpulan data penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BPPKS. (2006). *Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)*. Departemen Kehutanan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Sulawesi (BPPKS).
- Bracke, M.B.M., De Greef, K.H. and Hopster, H. (2005). *Qualitative Stakeholder Analysis For The Development Of Sustainable Monitoring Systems For Farm Animal Welfare*. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 18, 27-56.
- Flak, L. S., Nordheim, S. and Munkvold, B. E. (2008). *Analyzing Stakeholder Diversity in G2G Efforts: Combining Descriptive Stakeholder Theory*

and Dialectic Process Theory. *e-Service Journal*, 6(2), 3-23.

- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management. A Stakeholder Approach*. University of Minnesota. Massachusetts. Pitman Publishing Inc.
- Friedman, A.L. and Miles, S. (2006). *Stakeholders. Theory and Practice*. Oxford UK: OXFORD University Press.
- Gardner, J. R., Rachlin, R. and Sweeny, H.W.A. (1986). *Handbook of Strategic Planning*. http://www.12manage.com/methods_stakeholder_mapping.html. Akses Tgl. 23 Juli 2011.
- Kadir W., Abd., Kusumedi, P., Hapsari, E., Ruru, A. dan Hamdan. (2008). *Teknologi dan Kelembagaan Sosial Forestry di KHDTK Mengkendek. Kajian Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat Serta Potensi Sumberdaya Hutan di KHDTK Mengkendek* (Laporan Hasil Penelitian). Makassar: Balai Penelitian Kehutanan Makassar. (Tidak Dipublikasikan).
- Kadir W., Abd. dan Hapsari, E. (2011). *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di KHDTK Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Prosiding Ekspose Hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Makassar. Tanggal 27 Oktober 2011*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- Kusumedi, P dan Bisjoe, A.R.H. (2010). *Analisis Stakeholder dan Kebijakan Pembangunan KPH Model Maros di Propinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 7(3), 179-193.
- Meyers, J. (2005). *Analisis Kekuatan Stakeholder dalam Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsensus*. Editor: Suporahardjo. Bogor: Pustaka Latin.
- Mushove, P. and Vogel, C. (2005). *Heads or Tails? Stakeholder Analysis as a Tool for Conservation Area Management*. *Global Environmental Change*, 15, 184-198.
- Rastogi, A., Badola, R., Hussain, S. A., and Hickey, G. M. (2010). *Assessing the Utility of Stakeholder Analysis to Protected Areas Management: The Case of Corbett National Park, India*. *Biological Conservation* 143, 2956-2964.
- Nielsen, J. R. dan Mathiesen, C. (2006). *Stakeholder Preferences for Danish Fisheries Management of Sand Eel and Norway Pout*. *Fisheries Research*, 77, 92-101.
- Reed, M.S. (2008). *Stakeholder Participation for Environmental Management: A Literature Review*. *Biological Conservation*, 141, 2417-2431.
- Reed, M.S, Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C.H., and Stringer, L.C. (2009). *Who's In And Why? A Typology Of Stakeholder Analysis Methods For Natural Resource Management*. *Journal of Environmental Management*, 90, 1933-1949.

- Salam Md., Abdus and Noguchi, T. (2006). Evaluating Capacity Development for Participatory Forest Management in Bangladesh's Sal Forests Based on '4Rs' Stakeholder Analysis. *Forest Policy and Economics*, 8, 785–796.
- Thompson, R. (2011). *Stakeholder Analysis. Winning Support for Your Projects*. http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm. Akses Tanggal 20 Pebruari 2011.
- Townsley, P. (1998). *Social Issues in Fisheries*. FAO Fisheries Technical Paper. No. 375. Rome, FAO. 1998. 39p. FAO CORPORATE DOCUMENT REPOSITORY. <http://www.fao.org/DOCREP/003/W8623E/w8623e05.htm>. Akses Tanggal 23 Juli 2011.
- Yang, Z., Ju, M., Zhou, Y., Wang, Q., and Ma, N. (2010). *An Analysis of Greenhouse Gas Emission Trading System from the Perspective of Stakeholders*. *Procedia Environmental Sciences*, 2, 82–91.

